

ABSTRAK

Penelitian tentang “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Sapi Tahun 2012 di Polres Batang” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan, cara menentukan unsur kerugian negara tindak pidana bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang, hambatan dan cara mengatasinya.

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumen. Permasalahan dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dan kewenangan.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Penyidikan dilakukan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan. Cara menentukan unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang melalui metode menghitung jumlah penjualan sapi, realisasi biaya operasional pengelolaan sapi, saldo kas, fisik uang yang ada pada Bendahara Kelompok Tani, dan menghitung nilai Kerugian keuangan Negara, yaitu hasil penghitungan saldo kas dikurangi fisik uang yang ada pada Bendahara Kelompok Tani. Hambatan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bantuan sosial sapi tahun 2012 di Polres Batang yaitu berupa ruang penyidikan yang kurang memadai, kemampuan dan jumlah personil yang terbatas, rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, audit penentuan kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah membutuhkan waktu yang lama dan hambatan dalam menghadirkan ahli. Cara mengatasi hambatan yaitu mengupayakan ruang penyidikan yang memadai, meningkatkan kemampuan dan jumlah Penyidik dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, koordinasi dan pemantauan proses penentuan kerugian Negara di BPKP Provinsi Jawa Tengah serta aktif melakukan komunikasi dengan ahli

Perlu ada pengawasan yang sangat ketat dalam program bantuan sosial sapi kepada masyarakat. Perlu dibentuk perwakilan BPKP di tiap Kabupaten/Kota untuk memudahkan dalam penanganan korupsi, khususnya dalam penentuan kerugian negara. Perlu ditetapkan pihak yang dapat menentukan kerugian negara selain BPK dan BPKP karena ketentuan mengenai instansi dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana dimaksud di atas cakupannya masih terlalu luas.

Kata kunci : Penyidikan, Korupsi, Bantuan Sosial Sapi

ABSTRACT

The research on "the investigation of crime investigation of cow's social assistance year 2012 at Batang police" aims to know and analyze the implementation of investigation, how to determine the element of loss of the state of cow social aid in 2012 at Batang polres, obstacles and how to overcome it.

The approach used is empirical juridical. data collection through interviews, observation, literature study and documents. Problems are analyzed based on theories of legal certainty and authority.

The investigation of the crime of social assistance of cow in 2012 in Batang district police is conducted based on the criminal procedure code and based on the regulation of chief of police number 14 year 2012 on investigation management. investigations are made after sufficient initial evidence is obtained at the inquiry stage. how to determine the element of state losses in the crime of corruption of cow social aid in 2012 in Batang resort police through the method of calculating the number of cattle sales, the realization of the operational cost of cattle management, cash balance, physical money available to the treasurer of farmers group, and calculate the value of state financial losses, the calculation of cash balance minus the physical money available to the treasurer of farmer group. Obstacles to investigate the crime of corruption of cow social aid in 2012 in Batang polres is in the form of inadequate investigation space, limited ability and number of personnel, low public participation in eradicating corruption crime, audit of determination of state losses by BPKP of central java province takes time the old and the obstacles in bringing in expert witnesses. The way to overcome obstacles is to seek an adequate investigation space, improve the ability and the number of investigators and community empowerment in eradicating corruption, coordination and monitoring process of determining state losses in BPKP central java province and actively communicating with expert witnesses

There needs to be very strict supervision in the cow social assistance program to the community. It is necessary to establish BPKP representatives in each regency / city to facilitate the handling of corruption, especially in determining state losses. It is necessary to stipulate a party that can determine state losses other than the cpc and BPKP due to the provisions of the agency and other parties (including those of the company), which may indicate material truths in the calculation of the financial loss of the state and / or may prove the case in question as mentioned above the coverage is still too wide.

Keyword : Investigation, Corruption, Social Assistance Cattle